



LAPORAN SEMESTER I

2023



**BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan karuniaNya kepada seluruh jajaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pada Semester I Tahun 2023 (Januari sampai dengan kondisi 30 Juni 2023) dengan baik.

Berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2023 Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu melakukan pengendalian dan evaluasi sebagai bentuk pemenuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Laporan Kinerja Semester I Tahun Anggaran 2023 ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dan kiranya dapat menjadi pijakan dalam melaksanakan berbagai aktivitas pada tahun - tahun mendatang.

Kupang, Juli 2023

9
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


DRS. ZAKARIAS MORUK, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631209 198603 1 016

Daftar Isi

	halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Organisasi dan Personalia.....	3
1.5. Sistematika Penyajian.....	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
2.1. Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah.....	7
2.2 Target Kinerja	7
BAB III PELAKSANAAN.....	10
3.1. Pelaksanaan Administrasi Umum dan Kepegawaian.....	10
3.2 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	13
BAB IV PERMASALAHAN DAN SOLUSI	59
4.1 Permasalahan dan Solusi	59
BAB V PENUTUP.....	64

Daftar Tabel

Tabel		halaman
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2022.....	12
Tabel 3.1	Rekapitulasi Surat Masuk Badan Keuangan Daerah...	13
Tabel 3.2	Rekapitulasi Surat Keluar Badan Keuangan Daerah...	13
Tabel 3.3	Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional.....	14
Tabel 3.4	Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan.....	15
Tabel 3.5	Komposisi Pegawai berdasarkan Agama.....	15
Tabel 3.6	Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan Umum....	16
Tabel 3.7	Komposisi Tenaga Kontrak.....	16
Tabel 3.8	Realisasi Pendapatan Badan Keuangan Per 30 Juni 2022.....	17
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Belanja.....	22
Tabel 3.10	Hasil Pelaksanaan Bidang Anggaran.....	33
Tabel 3.11	Hasil Pelaksanaan Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota.....	35
Tabel 3.12	Hasil Pelaksanaan Bidang Perbendaharaan.....	53
Tabel 3.13	Hasil Pelaksanaan Program Kegiatan Bidang Akuntansi dan Pelaporan.....	59

Daftar Gambar

Gambar		Halaman
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah.....	5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT seperti yang termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 2 Tahun 2021 memiliki tugas membantu Gubernur untuk melaksanakan fungsi penunjang keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT selama semester I Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan berbagai kegiatan. Berbagai kegiatan tersebut dilaksanakan dengan maksud agar seluruh rencana program dan kegiatan dapat terealisasi, terarah dan tepat sasaran.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada semester I tahun 2023, maka disusunlah Laporan Kinerja Semester I. Melalui Laporan Kinerja Semester I diharapkan dapat menjadi informasi mengenai kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang. Peningkatan kinerja diperlukan agar Badan Keuangan Daerah dapat lebih meningkatkan tugas dan fungsinya dalam rangka berperan memberikan dukungan teknis dan administrasi di bidang keuangan daerah.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah ;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- k. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- l. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- m. (Pergub Penjabaran APBD 2022 dan Perubahanya)
- n. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penatausahaan, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya serta Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2017.
- o. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Semester I Badan Keuangan Daerah Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Semester I Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2023 adalah untuk menilai serta mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dengan dasar evaluasi yang dilakukan, selanjutnya dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang guna peningkatan kinerja.

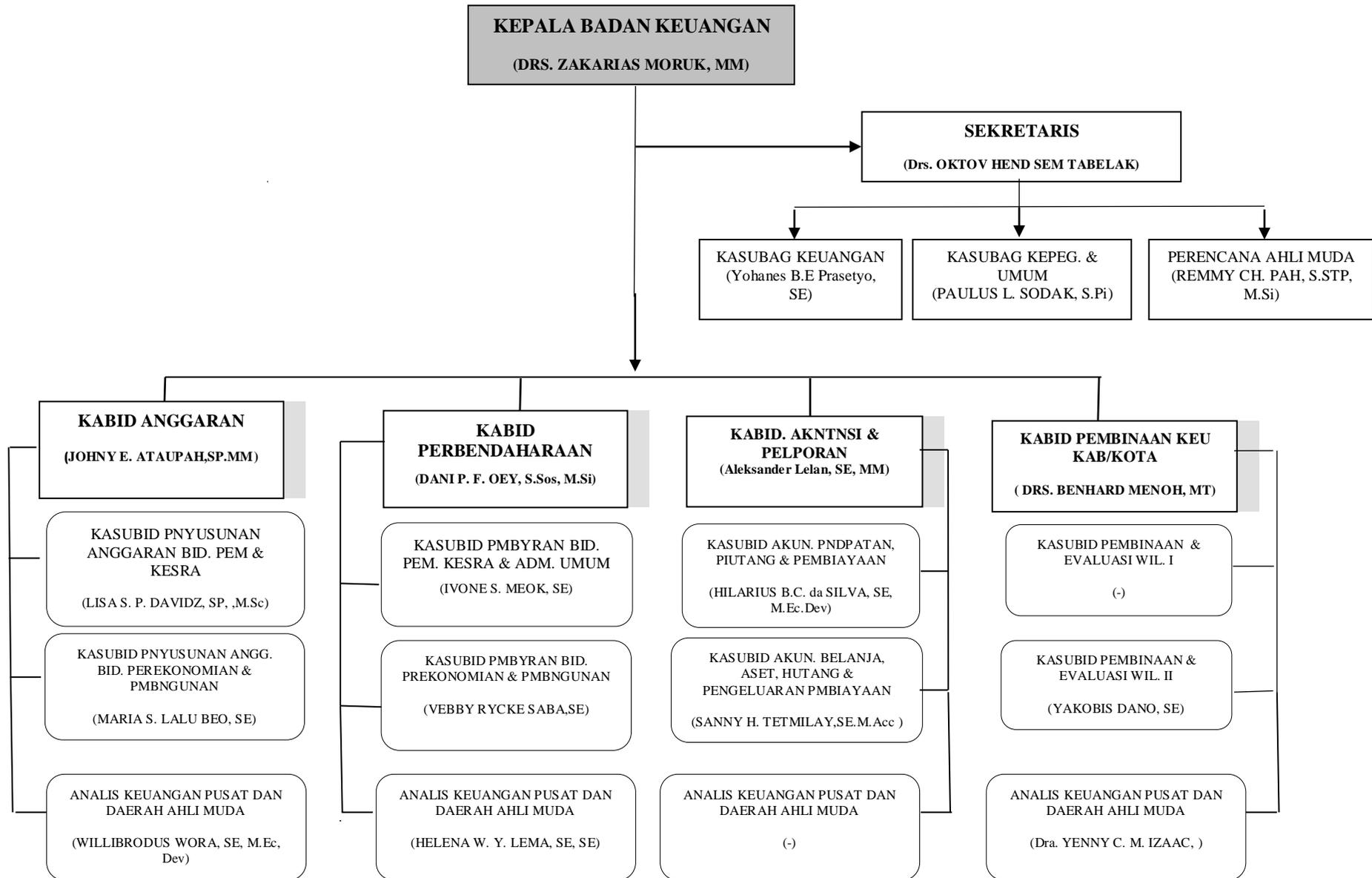
1.4 Organisasi dan Personalia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, struktur Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Sub Keuangan.
 - 2) Sub Kepegawaian dan Umum.
- b. Bidang Anggaran, terdiri atas :
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan.

- 2) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
- c. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :
- 1) Sub Bidang Pembayaran Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum.
 - 2) Sub Bidang Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
- d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas :
- 1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan.
 - 2) Sub Bidang Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan.
- e. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten /Kota, terdiri atas :
- 1) Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I.
 - 2) Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu.

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



1.5 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Semester ini secara umum menginformasikan capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT semester I Tahun 2023. Membandingkan antara capaian kinerja dengan rencana kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari hasil analisis terhadap celah kinerja tersebut, dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan pola pikir dimaksud, sistematika penyajian Laporan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Semester I Tahun 2023 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Organisasi dan Personalia
- 1.5 Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1 Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah
- 2.2 Target Kinerja

BAB III PELAKSANAAN

- 3.1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian
- 3.2 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

BAB IV PERMASALAHAN DAN SOLUSI

- 4.1 Permasalahan
- 4.2 Solusi

BAB V PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah.
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah.
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah.
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan daerah.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Target Kinerja

Pada tahun 2023, Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT adalah untuk mewujudkan manajemen target kinerja jangka menengah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BADAN KEUANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			AWAL	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100%	100%	<i>Jumlah dokumen yang di hasilkan secara tepat waktu x100%</i> <i>Jumlah seluru dokumen yang di hasilkan</i>

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 14.927.138.170,-
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 947.253.712.446,-
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 1.398.409.172,-
	Jumlah	Rp. 963.579.259.788,-

Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT

**BAB III
PELAKSANAAN**

3.1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian

A. Pelayanan Administrasi dan Umum

1. Surat Masuk

**Tabel 3.1
Rekapitulasi Surat Masuk Badan Keuangan Daerah Prov. NTT
Januari s.d. Juni 2023**

Unit	Januari 2023	Februari 2023	Maret 2023	April 2023	Mei 2023	Juni 2023
Sekretariat	51	44	72	38	43	29
Bidang Anggaran	42	38	53	61	64	46
Bidang Akuntansi dan Pelaporan	40	35	66	57	60	43
Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota	2	1	6	7	3	4
Bidang Perbendaharaan	52	44	89	72	98	48

Sumber : Sekretariat Kepala Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

2. Surat Keluar

**Tabel 3.2
Rekapitulasi Surat Keluar Badan Keuangan Daerah Prov. NTT
Januari s.d. Juni 2023**

Unit	Januari 2023	Februari 2023	Maret 2023	April 2023	Mei 2023	Juni 2023
Sekretariat	49	46	61	33	67	43
Bidang Anggaran	11	10	20	16	11	15
Bidang Akuntansi dan Pelaporan	19	18	35	35	29	16
Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota	17	17	14	14	21	21
Bidang Perbendaharaan	31	32	51	23	35	28

Sumber : Sekretariat Kepala Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

Membuat perencanaan kebutuhan sarana kearsipan yang berada di sekretariat untuk kebutuhan pemberkasan arsip file kepegawaian dari masing-masing PNS yang ada. Pengolahan kearsipan/naskah dinas, Penggandaan arsip/naskah dinas, Pengelolaan kearsipan/surat-menyurat, Perawatan naskah dinas, Penyediaan barang peralatan kantor. Penyediaan barang perlengkapan kantor, Penyelenggaraan rapat dinas, Pengamanan kantor, Penyediaan air dan listrik, Penyediaan sarana komunikasi, serta Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana.

Pengelolaan data kepegawaian, Penyiapan mutasi dan pembuatan usulan kenaikan pangkat, cuti, gaji berkala dan pensiun. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan pegawai, Penyiapan bahan kesejahteraan pegawai, Pembuatan buku jaga kenaikan pangkat, gaji berkala dan pensiun, Pengusulan mutasi pegawai Badan, Penyiapan bahan kesejahteraan rekapan kehadiran pegawai Badan, Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan pegawai Badan serta Pelayanan tamu.

B. Kepegawaian

Keadaan pegawai pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 69 orang dengan perincian sebagai berikut (Januari sampai dengan Juni 2023) :

1. Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional

Tabel 3.3
Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional

NO	JABATAN	JUMLAH	TINGKATAN (eselon/ jenjang)	Ket
1.	Kepala Badan	1 orang	II-a	Ada
2.	Sekretaris	1 orang	III-a	Ada
3.	Kepala Bidang	4 orang	III-a	Ada
4.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang	13 orang	IV-a	Ada
5.	Kelompok Jabatan Fungsional.	50orang		Ada
Total		69 orang		

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

2. Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

Tabel 3.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		GOLONGAN			
		L	P	I	II	III	IV
1.	Sekretariat	9	9	-	1	15	2
2.	Bidang Anggaran	6	4	-	2	5	3
3.	Bidang Perbendaharaan	4	9	-	-	13	1
4.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	6	10	-	-	13	2
5.	Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	6	6	-	1	9	2
Jumlah		33	38		4	55	10
Total		69		69			

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

3. Berdasarkan Agama

Tabel 3.5
Komposisi Pegawai Berdasarkan Agama

NO	UNIT KERJA	AGAMA				
		KP	KK	Islam	Hindu	Budha
1.	Sekretariat	9	7	1	-	-
2.	Bidang Anggaran	9	3	-	-	-
3.	Bidang Perbendaharaan	7	6	1	-	-
4.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	7	6	1	-	-
5.	Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	8	2	1	1	-
Jumlah		40	24	4	1	-
Total		69				

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

4. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 3.6
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Umum

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN						
		SD	SLTP	SLTA	D.I II/ III	D.IV	S1	S2
1.	Sekretariat	-	-	3	-	1	11	2
2.	Bidang Anggaran	-	-	-	2	-	7	3
3.	Bidang Perbendaharaan	-	-	-	3	-	10	1
4.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	-	-	-	1	-	7	6
5.	Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota	-	-	3	-	-	5	4
<i>Jumlah</i>		-	-	6	6	1	40	16
Total		69						

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

5. Tenaga Kontrak

Tabel 3.7.
Komposisi Tenaga Kontrak

NO	TENAGA KONTRAK	JUMLAH
1.	LAKI-LAKI	41
2.	PEREMPUAN	32
Total		73 orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT

3.2 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

A. Kinerja Badan Keuangan

1. Realisasi Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2023, target pendapatan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT sebesar **Rp. 3.347.190.047.050,-**. Berikut adalah realisasi Pendapatan Daerah kondisi Per 30 Juni 2023

Tabel. 3.8
Realisasi Pendapatan pada Badan Keuangan
per 30 Juni 2023

						Uraian	Pagu	Realisasi	%
4						PENDAPATAN DAERAH	3.347.190.047.050	2.012.485.280	60,12
4	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	146.275.172.050	60.215.898.444	41,17
4	1	01				Pajak Daerah			
4	1	01	05			Pajak Rokok			
4	1	01	05	01		Pajak Rokok			
4	1	01	05	01	0001	Pajak Rokok			
4	1	03				Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	86.982.172.050	54.063.983.209	62,16
4	1	03	02			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	86.982.172.050	54.063.983.209	62,16
4	1	03	02	01		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	86.982.172.050	54.063.983.209	62,16
4	1	03	02	01	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN (Lembaga Keuangan)	86.982.172.050	54.063.983.209	62,16
4	1	04				Lain-lain PAD yang Sah	59.293.000.000	6.151.915.235	10,38
4	1	04	05			Jasa Giro	10.000.000.000	986.916.918	9,87

4	1	04	05	01		Jasa Giro pada Kas Daerah	10.000.000.000	986.916.918	9,87
4	1	04	05	01	0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	10.000.000.000	986.916.918	9,87
4	1	04	07			Pendapatan Bunga	1.000.000.000	177.340.214	17,73
4	1	04	07	01		Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.000.000.000	177.340.214	17,73
4	1	04	07	01	0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.000.000.000	177.340.214	17,73
4	1	04	08			Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	23.891.500.000	831.384.220	3,48
4	1	04	08	01		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	23.891.500.000	831.384.220	3,48
4	1	04	08	01	0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	23.891.500.000	831.384.220	3,48
4	1	04	11			Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	22.891.500.000	19.138.900	0,08
4	1	04	11	01		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	22.891.500.000	19.138.900	0,08
4	1	04	11	01	0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	22.891.500.000	19.138.900	0,08
4	1	04	15			Pendapatan dari Pengembalian	1.510.000.000	4.137.134.982	273,98
4	1	04	15	01		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	10.000.000		
4	1	04	15	01	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	10.000.000		
4	1	04	15	03		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	500.000.000	268.627.292	53,73
4	1	04	15	03	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	500.000.000	268.627.292	53,73
4	1	04	15	04		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	1.000.000.000	3.868.507.689	386,85
4	1	04	05	04	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	1.000.000.000	3.868.507.689	386,85
4	2					PENDAPATAN TRANSFER	3.199.163.279.000	1.951.275.777.089	60,99

4	2	01				Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.199.163.279.000	1.951.275.777.089	60,99
4	2	01	01			Dana Perimbangan	3.199.163.279.000	1.951.275.777.089	60,99
4	2	01	01	01		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	53.785.499.000	23.455.763.392	43,61
4	2	01	01	01	0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.215.041.000	1.127.566.800	35,07
4	2	01	01	01	0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	42.774.519.000	17.109.807.600	40,00
4	2	01	01	01	0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	6.442.849.000	4.609.498.492	71,54
4	2	01	01	01	0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	1.139.084.000	512.587.800	45,00
4	2	01	01	01	0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	214.006.000	96.302.700	45,00
4	2	01	01	01	0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)			
4	2	01	01	02		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.857.019.095.000	1.486.498.232.035	80,05
4	2	01	01	02	0001	DAU	1.857.019.095.000	1.486.498.232.035	80,05
4	2	01	01	03		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	474.648.628.000	105.089.457.000	22,14
4	2	01	01	03	0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	76.332.590.000	18.458.147.500	24,18
						::: SMK	121.920.575.000	30.167.643.750	24,74
4	2	01	01	03	0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	11.138.775.000	2.679.416.250	24,05
4	2	01	01	03	0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah			
4	2	01	01	03	0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	22.289.568.000		
4	2	01	01	03	0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian			
						DAK Fisik BidangPertanian-penugasan-pembangunan/renovasi sarana dan prasarana pembangunan pertanian	17.015.773.000	14.126.644.500	83,02
4	2	01	01	03	0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	-		

4	2	01	01	03	0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	31.926.486.000		
4	2	01	01	03	0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	18.524.248.000		
4	2	01	01	03	0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	147.670.491.000	39.657.605.000	26,86
4	2	01	01	03	0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	4.784.830.000		
						DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan- Penugasan	5.337.006.000		
4	2	01	01	03	0046	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	17.708.286.000		
4	2	01	01	04		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	813.710.057.000	336.232.324.662	41,32
4	2	01	01	04	0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	510.101.450.000	249.839.512.012	48,98
4	2	01	01	04	0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	9.642.500.000		
4	2	01	01	04	0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	245.164.152.000	73.549.245.000	30,00
4	2	01	01	04	0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	13.442.250.000	1.054.924.866	7,85
4	2	01	01	04	0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	8.734.736.000	2.620.420.800	30,00
4	2	01	01	04	0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	2.000.000.000	928.457.000	46,42
4	2	01	01	04	0010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	2.000.000.000	987.499.531	49,37
4	2	01	01	04	0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17.936.156.000	5.394.047.550	30,07
4	2	01	01	04	0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	3.345.413.000	1.300.958.924	38,89
4	2	01	01	04	0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	375.000.000	114.421.779	30,51
4	2	01	01	04	0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	968.400.000	442.837.200	45,73
4	2	01	02			Dana Insentif Daerah (DID)			
4	2	01	02	01		DID			
4	2	01	02	01	0001	DID			

4	3					LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.751.596.000	994.190.747	56,76
4	3	01				Pendapatan Hibah	1.751.596.000	994.190.747	56,76
4	3	01	01			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.751.596.000	994.190.747	56,76
4	3	01	01	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.751.596.000	994.190.747	56,76
4	3	01	01	01	0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.751.596.000	994.190.747	56,76
						:: Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.751.596.000	994.190.747	56,76
						JUMLAH	3.347.190.047.050	2.012.485.866.280	60,12

Sumber Bidang Perbendaharaan (BUD)

2. Realisasi Anggaran Belanja berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor : 911/25/DPA/BKUD2/2023, Belanja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 963.574.259.788** -. Pagu dan Realisasi Anggaran tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.9

Realisasi Anggaran Belanja pada Badan Keuangan Daerah per 30 Juni 2023

NO						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
5	2					KEUANGAN	963.574.259.788	225.888.501.806	33,44%
						Badan Keuangan Daerah	963.574.259.788	225.888.501.806	33,44%
5	2	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.927.138.170	6.012.177.558	40,28%
5	2	1	1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	247.435.900	91.360.900	36,92%
5	2	1	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	4.885.400	16,28%
5	2	1	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	60.351.800	21.581.000	35,76%
5	2	1	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	78.455.000	64.894.500	82,72%
5	2	1	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.629.100	-	-
5	2	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.206.392.818	3.354.536.986	36,44%
5	2	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.990.123.218	2.747.347.986	39,30%

5	2	1	1	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.037.106.600	513.773.000	25,22%
5	2	1	1	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	119.163.000	59.879.000	50,25%
5	2	1	1	2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	30.000.000	16.750.000	55,83%
5	2	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.000.000	16.787.000	55,96%
5	2	1	1	3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000	2.850.000	57,00%
5	2	1	1	3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	2.850.000	57,00%
5	2	1	1	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	93.473.000	54.336.000	58,13%
5	2	1	1	5	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	93.473.000	54.336.000	58,13%
5	2	1	1	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	880.304.480	654.464.386	74,35%
5	2	1	1	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	169.892.480	163.822.500	96,43%
5	2	1	1	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.412.000	36.650.000	72,70%
5	2	1	1	6	7	Penyediaan Bahan/Material	210.000.000	66.213.625	31,53%
5	2	1	1	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	210.000.000	178.751.420	85,12%
5	2	1	1	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240.000.000	209.026.841	87,09%
5	2	1	1	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	190.066.400	120.222.811	63,25%
5	2	1	1	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	190.066.400	120.222.811	63,25%
5	2	1	1	8	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.012.010.572	1.569.591.740	39,12%
5	2	1	1	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.565.400	6.389.500	17,47%
5	2	1	1	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	875.000.000	312.500.000	35,71%

5	2	1	1	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Melebihi Pagu Validasi	3.109.445.172	1.250.702.240	40,22%
	2	1	1	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283.455.000	164.814.735	58,14%
5	2	1	1	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	236.820.000	151.099.735	63,80%
0	1	0	9	0	9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.635.000	13.715.000	29,41%
5	2	2	1			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	947.253.712.446	218.725.863.173	23,09%
5	2	2	1	1		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	9.425.692.781	2.047.258.655	21,72%
5	2	2	1	1	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	435.781.157	16.401.981	3,76%
5	2	2	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	509.880.500	-	-
5	2	2	1	1	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	253.178.996	200.089.500	79,03%
5	2	2	1	1	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	253.164.828	37.510.600	14,82%
5	2	2	1	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.896.237.300	272.462.685	9,41%
5	2	2	1	1	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3.087.268.400	769.761.940	24,93%
5	2	2	1	1	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.990.181.600	751.031.949	37,74%
5	2	2	1	2		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	2.293.566.700	762.470.213	33,24%
5	2	2	1	2	2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan	434.855.500	20.654.441	4,75%

						Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota			
5	2	2	1	2	3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	435.570.900	39.263.700	9,01%
5	2	2	1	2	4	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	502.371.800	139.756.280	27,82%
5	2	2	1	2	5	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	779.597.000	486.473.792	62,40%
5	2	2	1	2	7	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	116.171.500	52.555.000	45,24%
5	2	2	1	2	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	25.000.000	23.767.000	95,07%
5	2	2	1	3		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.902.327.688	922.788.770	48,51%
5	2	2	1	3	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	455.918.500	313.236.100	68,70%
5	2	2	1	3	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	243.660.100	56.718.300	23,28%
5	2	2	1	3	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	384.874.696	127.319.100	33,08%
5	2	2	1	3	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan	226.999.696	148.069.925	59,74%

							Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			
5	2	2	1	3	8		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	595.874.696	277.445.345	16,32%
5	2	2	1	4			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.406.129.102	2.038.368.711	67,31%
0	2	1	0	4	1		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan kas dan Pengeluaran Kas Daerah	25.000.000	-	-
5	2	2	1	4	3		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	319.457.002	180.833.000	56,61%
5	2	2	1	4	5		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2.061.672.100	1.857.535.711	70,27%
5	2	2	1	5			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	931.220.996.175	212.954.976.824	22,51%
5	2	2	1	5	4		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	70.214.974.393	-	-
5	2	2	1	5	8		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	11.474.756.000	-	-
5	2	2	1	5	9		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	79.639.835.896	824.595.125	0,87%
5	2	2	1	5	10		Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	769.891.429.886	212.130.381.699	27,55%
5	2	3					PROGRAM PENGELOLAAN	1.393.409.172	1.150.461.075	81,99%

						BARANG MILIK DAERAH			
5	2	3	1	1		Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.393.409.172	1.150.461.075	81,99%
5	2	3	1	1	1	Penyusunan Standar Harga	1.393.409.172	1.150.461.075	81,99%

Sumber : SPJ Belanja – Fungsional Juni 2023

B. Kinerja Badan Keuangan Daerah berdasarkan Program dan Kegiatan

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan Kinerja Badan Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Selama Semester I, hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT yang menjadi tanggungjawab teknis dari Sekretariat berdasarkan DPA Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT TA. 2023 terdiri dari 14 kegiatan dan 40 sub kegiatan dimana setiap kegiatan dan sub kegiatan terbagi dalam 3 bagian, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD

Sub Bagian PDE bertanggungjawab untuk menangani kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Pagu sebesar Rp. 247.435.900,- Realisasi sebesar Rp. 91.360.900,- (36,96%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan, :

- ⇒ Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- ⇒ Tersusunnya LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- ⇒ Tersusunnya SK Pembentukan Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan dan Dokumentasi pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
- ⇒ Tersusunnya SK Pejabat Pengelola Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggara 2023.

- ⇒ Tersusunnya SK Administrator Elektronik Kinerja (E-Kinerja/E-Monev Performance) pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
- ⇒ Tersusunnya SK Administrator Elektronik Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (E-MEP) pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.

b. Sub Kegiatan Administrasi Keuangan

Sub Bagian Keuangan bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Keuangan Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD, dan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran. Pagu sebesar Rp. 9.206.392.818,- Realisasi Rp. 3.354.536.986 (36,44%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan:

- ⇒ Tersusunnya Laporan Realisasi Keuangan
- ⇒ Tersusunnya SK Penunjukkan/penetapan Petugas Verifikasi SPJ pada kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
- ⇒ Terjawabnya temuan Inspektur Jenderal
- ⇒ Tersusunnya SK Penunjukkan/penetapan Pejabat Pengelola Keuangan kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
- ⇒ Tersusunnya SK Penunjukkan/penetapan Petugas Penyiapan SPP dan SPM kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
- ⇒ Tersusunnya SK Penunjukkan/penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada kegiatan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.

- ⇒ Tersusunnya SK Penunjukkan/penetapan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD. Pagu sebesar Rp. 5.000.000,- Realisasi Rp. 2.850.000- (57.00%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

- ⇒ Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah.

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian PD

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Pagu sebesar Rp. 93.473.000,- Realisasi Rp.54.336.000,- (58.13%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

- ⇒ Tersusunnya Laporan Budaya Kerja.
- ⇒ Penyelesaian Dokumen Kenaikan Pangkat.
- ⇒ Penyelesaian Dokumen Pensiun.
- ⇒ Tersusunnya Laporan Presentasi Kehadiran.

e. Kegiatan Administrasi Umum PD

Sub Bagian Keuangan bertanggungjawab menangani kegiatan Administrasi Umum PD yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyediaan Bahan/Material, Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. Pagu sebesar Rp. 880.304.480,- Realisasi Rp. 654.464.386,- (74,35%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

- ⇒ Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
- ⇒ Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
- ⇒ Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- ⇒ Tersedianya Bahan/Material

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Pagu sebesar Rp. 190.066.400,- Realisasi Rp. 120.222.811,- (63,25%).

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Melebihi Pagu Validasi. Pagu sebesar sebesar Rp. 4.012.010.572,- Realisasi Rp. 1.569.591.740,- (39,12%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan

- ⇒ Tersedianya Jasa Surat Menyurat

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggungjawab menangani kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Pagu sebesar Rp. 283.455.000,- Realisasi

Rp. 164.814.735,- (58,14). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

⇒ Tersedianya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah ditangani oleh 4 Bidang yaitu Bidang Anggaran, Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota, Bidang Perbendaharaan dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Dari pagu sebesar Rp. 947.253.712.446,- Realisasi Rp. 218.725.863.173 (23,09%).Berikut adalah realisasi kinerja per kegiatan :

a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Anggaran dengan Pagu sebesar Rp. 9.425.692.781,- Realisasi Rp. 2.047.258.655 (21,72%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

- ⇒ Koordinasi dan Penyusunan KUA-PPAS serta Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
- ⇒ Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD serta Perubahanannya;
- ⇒ Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD serta Perubahanannya;
- ⇒ Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD serta Perubahanannya;

- ⇒ Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran;
- ⇒ Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan;
- ⇒ Penyusunan Petunjuk Teknis Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- ⇒ Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- ⇒ Menginventarisir pelaksanaan evaluasi Rencana Kerja Anggaran SKPD;
- ⇒ Penyusunan Standar Harga Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
- ⇒ Konsultasi terkait Tambahan Penghasilan Pegawai ASN (Dinas Kesehatan Kependudukan dan pencatatan Sipil);
- ⇒ Konsultasi terkait dengan Penjadwalan Tahapan Perencanaan dan Penganggaran Pada Aplikasi SIPD Kemendagri (Bappeda Kab. TTS);
- ⇒ Pembahasan TPP Pegawai (Bappelitbangda);
- ⇒ Konsultasi dan kordinasi terkait Perubahan (Badan Pendapatan dan Aset Daerah);
- ⇒ Konsultasi Perubahan anggaran (UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan);
- ⇒ Verifikasi Kelengkapan SK Tambahan Penghasilan Pegawai (Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan);
- ⇒ Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD (Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil);
- ⇒ Konsultasi terkait Pencairan Ganti Uang (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah);
- ⇒ Kordinasi terkait penetapan SK Tambahan Penghasilan Pegawai (UPTD. PSLB3 pada DLHK);
- ⇒ Konsultasi Dana Alokasi Khusus Fisik 2023 (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan);
- ⇒ Konsultasi tentang penginputan Kelas Jabatan Tambahan Penghasilan Pegawai (Dinas Sosial);
- ⇒ Konsultasi Bantuan Sosial ikatan Dinas Perhubungan (Biro Pemerintahan);

⇒ Konsultasi Dana Hibah (Dinas Perindustrian dan Perdagangan).

Tabel 3.10

**Hasil Pelaksanaan Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah
per 30 Juni 2023**

Program	Rincian Kegiatan	Target (dokumen/kegiatan /buku)	Realisasi (dokumen/kegiatan /buku)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Koordinasi penyusunan dan verifikasi Dokumen Perubahan DPA-SKPD TA. 2023	- Proses Penandatanganan, Pencetakan dan Pembagian Dokumen Perubahan III DPA-SKPD TA. 2023	Dokumen Perubahan III DPA-SKPD TA. 2023	Terealisasi
	2. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	- Rapat terkait Pembahasan Perihal Penyesuaian Biaya Kontribusi Pelatihan pada SIPD Tahun Anggaran 2023	Pembahasan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi
		- Rapat terkait Pembahasan evaluasi Progres Pelaksanaan Tahap I	Pembahasan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi
		- Rapat terkait Penyampaian Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2023	Pembahasan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi
		- Rapat terkait Pembahasan Laporan Realisasi Penggunaan DAU Spesific Grant Tahap I	Pembahasan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi

	3. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	- Rapat terkait Pembahasan Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2024	Pembahasan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi
		- Rapat terkait Penyampaian Masukan Komisi-Komisi kepada Bidang Anggaran terkait Dengan Program dan Kegiatan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2024	Pembahasan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi
	4. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Rapat terkait Pembahasan Survey Standar Harga Khusus Sewa Rumah dan Sewa Kendaraan Bagi Anggota DPRD Provinsi NTT	Pembahasan ini sudah dilaksanakan	Terealisasi
		- Melaksanakan penginputan Survey Standar Harga Khusus Sewa Rumah dan Sewa Kendaraan Bagi Anggota DPRD Provinsi NTT	Kegiatan ini Sudah dilaksanakan	Terealisasi

b. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan Pagu sebesar Rp. 2.293.566.700,- Realisasi Rp. 762.470.213 (33,24%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.11
Hasil Pelaksanaan Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota Badan
Keuangan Daerah per 30 Juni 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN /RINCIAN KERJA	BENTUK/ WUJUD	REALISASI	KETERANGAN
PROGRAM : PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
KEGIATAN : PEMBINAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
A.	Sub kegiatan : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatan sebagai berikut :			
	1. Penyampaian Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 005/1175/BKUD5.2/2023 Tanggal 5 Juni 2023 Hal Undangan terkait Rencana kegiatan sosialisasi sekaligus penegakkan hukum cukai rokok ilegal di Kabupaten Kupang yang ditujukan kepada Bupati Kupang	Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 005/1175/BKUD5.2/2023 Tanggal 5 Juni 2023 Hal Undangan terkait Rencana kegiatan sosialisasi sekaligus penegakkan hukum cukai rokok ilegal di Kabupaten Kupang yang ditujukan kepada Bupati Kupang	Terinformasinya rencana kegiatan sosialisasi sekaligus penegakkan hukum cukai rokok ilegal di Kabupaten Kupang dan terinformasinya 3 (tiga) nama pejabat dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kupang guna melakukan kegiatan sosialisasi dan penegakkan	

			hukum cukai rokok ilegal di Kabupaten Kupang	
2. Penyampaian Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 005/1176/BKUD5.2/2023 Tanggal 5 Juni 2023 Hal Undangan terkait Rencana kegiatan sosialisasi sekaligus penegakkan hukum cukai rokok ilegal di Kota Kupang yang ditujukan kepada Walikota Kupang	Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 005/1176/BKUD5.2/2023 Tanggal 5 Juni 2023 Hal Undangan terkait Rencana kegiatan sosialisasi sekaligus penegakkan hukum cukai rokok ilegal di Kota Kupang yang ditujukan kepada Walikota Kupang.	Terinformasinya rencana kegiatan sosialisasi sekaligus penegakkan hukum cukai rokok ilegal di Kota Kupang dan terinformasinya 3 (tiga) nama pejabat dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang guna melakukan kegiatan sosialisasi dan penegakkan hukum cukai rokok ilegal di Kota Kupang		
3. Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Nomor 005/1179/BKUD5.2/2023 Tanggal 5 Juni 2023 Hal Undangan terkait Rencana kegiatan sosialisasi sekaligus penegakkan hukum cukai rokok ilegal di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang yang ditujukan kepada Kepala	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Nomor 005/1179/BKUD5.2/2023 Tanggal 5 Juni 2023 Hal Undangan terkait Rencana kegiatan sosialisasi sekaligus penegakkan hukum cukai rokok ilegal di	Terinformasinya rencana kegiatan sosialisasi sekaligus penegakkan hukum cukai rokok ilegal di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang		

	KPPBC TMPC	Kabupaten Kupang dan Kota Kupang yang ditujukan kepada Kepala KPPBC TMPC		
4.	Penyampaian Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Nomor 005/1178/BKUD5.2/2023 Tanggal 5 Juni 2023 Hal Undangan terkait Rencana kegiatan sosialisasi sekaligus penegakkan hukum cukai rokok illegal di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Nomor 005/1179/BKUD5. 2/2023 Tanggal 5 Juni 2023 Hal Undangan terkait Rencana kegiatan sosialisasi sekaligus penegakkan hukum cukai rokok illegal di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Terinformasinya rencana kegiatan sosialisasi sekaligus penegakkan hukum cukai rokok illegal di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang	
5.	Penyampaian surat Kepala Badan Keuangan Daerah terkait surat bupati Belu Nomor 005/1182/BKUD5.2/2023 Tanggal 5 Juni 2023 hal mohon petunjuk. Surat ditujukan kepada Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Organisasi dan Kepala Biro	surat bupati Belu Nomor 005/1182/BKUD5. 2/2023 Tanggal 5 Juni 2023 hal Undangan yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Organisasi	Hadirnya para pejabat yang mewakili Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Organisasi dan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara	Rapat dilaksanakan pada selasa, 6 Juni 2023

	Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	dan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Timur	
6.	Pelaksanaan rapat koordinasi terkait surat bupati Belu Nomor 005/1182/BKUD5.2/2023 Tanggal 5 Juni 2023 hal Undangan bersama pejabat yang mewakili Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Organisasi dan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Rapat koordinasi terkait surat bupati Belu Nomor 005/1182/BKUD5.2/2023 Tanggal 5 Juni 2023 hal Undangan bersama pejabat yang mewakili Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Organisasi dan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Adanya informasi dan kesepakatan rapat yang dituangkan dalam notulen rapat sebagai informasi dalam menjawab surat Bupati Belu	
7.	Penyampaian Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 067/1208/BKUD5.2/2023 Tanggal 7 Juni 2023 hal Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 yang ditujukan kepada Pj. Walikota Kupang dan Para	Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 067/1208/BKUD5.2/2023 Tanggal 7 Juni 2023 hal Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terinformasinya Hasil Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan topic pembahasan tentang: 1. Reformasi kebijakan	

	<p>Bupati se-Nusa Tenggara Timur</p>	<p>Tahun Anggaran 2023 yang ditujukan kepada Pj. Walikota Kupang dan Para Bupati se-Nusa Tenggara Timur</p>	<p>pemberian DAU baik specific Grant maupun Block Grant</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Optimalisasi Peran SIPD dalam mendukung system digitalisasi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelayanan public 3. Diskusi kelompok terkait permasalahan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungja wab serta pengelolaan asset daerah 4. Peninjauan lapangan dalam kaitan dengan upaya peningkatan PAD 5. Rapat Koordinasi Keuangan Daerah TA. 2024 	
--	--------------------------------------	---	---	--

			dilaksanakan pada Bulan Mei 2024 di Kabupaten Rote Ndao	
	8. Penyampaian Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 067/1218/BKUD5.2/2023 Tanggal 8 Juni 2023 hal Penyampaian Informasi terkait Perubahan Kedua Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah yang ditujukan kepada Bupati Belu	Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 067/1218/BKUD5.2/2023 Tanggal 8 Juni 2023 hal Penyampaian Informasi terkait Perubahan Kedua Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah yang ditujukan kepada Bupati Belu	Terinformasinya metode dan mekanisme serta hal-hal yang melatarbelakangi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk organisasi Perangkat Daerah yang baru dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.	
	9. Pelaksanaan rapat koordinasi terkait Bidang Penegakkan Hukum bersama Dinas Perindang Provinsi NTT, Bea Cukai, Satpol PP Provinsi NTT, Satpol PP Kota Kupang dan Satpol PP Kabupaten Kupang	rapat koordinasi terkait Bidang Penegakkan Hukum bersama Dinas Perindang Provinsi NTT, Bea Cukai, Satpol PP Provinsi NTT, Satpol PP Kota Kupang dan Satpol PP Kabupaten Kupang	Adanya informasi dan kesepakatan bersama terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan operasi bersama cukai rokok ilegal	Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin, 12 Juni 2023 di ruang rapat Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
	10.Rekapitulasi data Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Data Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala	Tersedianya data Peraturan Daerah dan Peraturan	Data Perda dan Perkada masih tersisa 16

	berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Surat Gubernur Nomor 900/183/BKUD5.3/2023 Tanggal 25 Januari 2023 Hal Data Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah	Daerah berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kepala Daerah berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kabupaten/Kota yang telah menyampaikan sebagai berikut : 1) Data Perda a. Kab. TTS b. Kab. Belu c. Kab. Rote Ndao d. Kab. Ngada e. Kab. Alor f. Kab. Sumba Timur 2) Data Perkada a. Kab. Ngada b. Kab. TTS c. Kab. Belu d. Kab. Rote Ndao e. Kab. Alor f. Kab. Sumba Timur	kab/kota yang belum menyampaikan
	11.Rekapitulasi data penganggaran pendanaan bersama Pemilukada serentak Tahun 2024 sesuai Surat Gubernur Nomor 910/101/BKUD5.2/2023 Tanggal 12 Januari 2023 Hal Data penganggaran	Data penganggaran pendanaan bersama Pemilukada serentak Tahun 2024	Tersedianya penganggaran pendanaan bersama Pemilukada serentak Tahun 2024. Kabupaten/Kota yang telah	Masih tersisa 6 (enam) kabupaten yang belum menyampaikan data penganggaran pendanaan bersama

	pendanaan bersama Pemilukada serentak Tahun 2024		menyampaikan sebagai berikut : 1) Kab. Belu 2) Kab. Sumba Barat Daya 3) Kab. Sabu Raijua 4) Kab. Kupang 5) Kab. Malaka 6) Kab. Ende 7) Kab. Alor 8) Kab. Lembata 9) Kab. Sumba Barat 10) Kab. Sumba Tengah 11) Kab. Sumba Timur 12) Kab. Manggarai Barat 13) Kota Kupang 14) Kab. TTS 15) Kabupaten Rote Ndao 16) Kabupaten Sikka	pemilukada serentak 2024
B.	Sub kegiatan : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota			Efektif dimulai bulan Juli 2023
	1. Pelaksanaan rapat koordinasi dengan Bidang	rapat koordinasi dengan Bidang	Adanya informasi dan	Rapat dilaksanakan

	<p>Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait Surat Bupati Sumba Barat Nomor P. 495/BKAD/53.12/06/2023 Tanggal 12 Juni 2023 Hal Permohonan Rekomendasi tentang Pendanaan Pemilukada Tahun 2024</p>	<p>Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait Surat Bupati Sumba Barat Nomor P. 495/BKAD/53.12/06/2023 Tanggal 12 Juni 2023 Hal Permohonan Rekomendasi tentang Pendanaan Pemilukada Tahun 2024</p>	<p>kesepakatan terkait item pendanaan pemilukada pada KPU, BAWASLU dan Kepolisian Resort Sumba Barat.</p>	<p>pada hari Rabu, 21 Juni 2023</p>
	<p>2. Pelaksanaan rapat koordinasi dengan perwakilan Bank Indonesia terkait realisasi anggaran pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- NTT</p>	<p>Rapat koordinasi dengan perwakilan Bank Indonesia terkait realisasi anggaran pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- NTT Keadaan : Sampai dengan Mei 2023</p>	<p>Terinformasinya alokasi dan realisasi APBD Pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota se-NTT serta diskusi terkait persoalan yang mengakibatkan realisasi rendah serta potensi pendapatan daerah di provinsi NTT</p>	<p>Rapat dilaksanakan pada senin, 26 juni 2023</p>
C.	<p>Sub kegiatan : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang</p>			

	<p>Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatan sebagai berikut :</p>			
	<p>1. Sosialisasi metode analisis pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bagian dalam materi evaluasi Ranperda pertanggungjawaban kabupaten/kota kepada seluruh PNS pada bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Rapat sosialisasi tentang metode analisis pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bagian dalam materi evaluasi Ranperda pertanggungjawab an kabupaten/kota bagi seluruh PNS pada bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Adanya informasi tentang metode analisis pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bagian dalam materi evaluasi Ranperda pertanggungjaw aban kabupaten/kota bagi seluruh PNS pada bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, 8 Juni 2023 di ruang rapat Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT</p>
	<p>2. Memeriksa kelengkapan dokumen evaluasi Ranperda pertanggungjawaban kabupaten/kota sesuai Lampiran Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 067/74f2/BKUD.2/2023 Tanggal 31 Maret 2023 Hal Percepatan Proses Penyelesaian Pertanggungjawaban</p>	<p>Dokumen evaluasi Ranperda pertanggungjawab an kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022</p>	<p>Kelengkapan dokumen dokumen evaluasi Ranperda pertanggungjawab an kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Kota Kupang, Kabupaten Belu, Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten TTU</p>	

	Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.		sebagai sumber informasi dalam rangka evaluasi Ranperda pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2022	
	3. Pelaksanaan Evaluasi dokumen Rancangan PERDA Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Manggarai Barat	Evaluasi dokumen Ranperda Pertanggungjawaban Kab. Manggarai Barat TA 2022	SK Gubernur NTT Nomor 900/127/BKUD5/2022 Tanggal 15 Juni 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Manggarai Barat Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022	Evaluasi dilaksanakan pada hari selasa, 13 Juni 2023
	4. Pelaksanaan Evaluasi dokumen Rancangan PERDA Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Sumba Tengah TA 2022	Evaluasi dokumen Rancangan PERDA Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Sumba Tengah TA 2022	SK Gubernur NTT Nomor 900/131/BKUD5/2022 Tanggal 23 Juni 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022	Evaluasi dilaksanakan pada hari selasa, 20 Juni 2023

			dan Rancangan Peraturan Bupati Sumba Tengah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022	
5. Pelaksanaan Evaluasi dokumen Rancangan PERDA Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kota Kupang TA 2022	Evaluasi dokumen Rancangan PERDA Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kota Kupang TA 2022	Evaluasi dokumen Rancangan PERDA Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kota Kupang TA 2022	SK Gubernur NTT Nomor 900/132/BKUD5/2022 Tanggal 3 Juli 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kota Kupang Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022	Evaluasi dilaksanakan pada hari senin, 26 Juni 2023
6. Pelaksanaan Evaluasi dokumen Rancangan PERDA Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Belu TA 2022	Evaluasi dokumen Rancangan PERDA Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Belu TA 2022	Evaluasi dokumen Rancangan PERDA Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Belu TA 2022	SK Gubernur NTT Nomor 900/133/BKUD5/2022 Tanggal 3 Juli 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan	Evaluasi dilaksanakan pada hari senin, 26 Juni 2023

			APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Belu Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022	
7. Pelaksanaa Evaluasi dokumen Rancangan PERDA Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Nagekeo TA 2022	Evaluasi dokumen Rancangan PERDA Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Nagekeo TA 2022	Evaluasi dokumen Rancangan PERDA Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Nagekeo TA 2022	SK Gubernur NTT Nomor 900/134/BKUD5/2023 Tanggal 3 Juli 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Nagekeo Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022	Evaluasi dilaksanakan pada hari selasa, 27 Juni 2023
8. Pelaksanaan Evaluasi dokumen Rancangan PERDA Pertanggungjawaban APBD Kabupaten TTU TA 2022	Evaluasi dokumen Rancangan PERDA Pertanggungjawaban APBD Kabupaten TTU TA 2022	Evaluasi dokumen Rancangan PERDA Pertanggungjawaban APBD Kabupaten TTU TA 2022	SK Gubernur NTT Nomor 900/135/BKUD5/2023 Tanggal 3 Juli 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan	Evaluasi dilaksanakan pada hari selasa, 27 Juni 2023

			APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati TTU Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022	
D.	Sub kegiatan : Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatannya yaitu Rapat Koordinasi Keuangan Daerah			Dilaksanakan pada bulan Mei 2023
	1. Penyusunan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/123/BKUD5/2023 Tanggal 12 Juni 2023 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sosialisasi dan Pemantauan Cukai Rokok Ilegal di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2023	Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/123/BKUD5/2023 Tanggal 12 Juni 2023 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sosialisasi dan Pemantauan Cukai Rokok Ilegal di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2023	Adanya Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/123/BKUD5/2023 Tanggal 12 Juni 2023 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sosialisasi dan Pemantauan Cukai Rokok Ilegal di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2023	
	2. Pelaksanaan Sosialisasi dan operasi bersama penegakkan hukum Cukai Rokok Ilegal di wilayah Kota Kupang dan	Sosialisasi dan operasi bersama penegakkan hukum Cukai Rokok Ilegal di wilayah Kota	Sosialisasi dan operasi bersama dilaksanakan di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten	Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 17 Juni 2023 di wilayah Kota Kupang dan

	Kabupaten Kupang	Kupang dan Kabupaten Kupang	<p>Kupang yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah Kota Kupang di 6 (enam) Kecamatan di Wilayah Kota Kupang yakni: Kecamatan Oebobo, Kecamatan Kota Raja, Kecamatan Kota Lama, Kecamatan Kelapa Lima, Kecamatan Maulafa dan Kecamatan Alak. 2. Wilayah Kabupaten Kupang di 3 (tiga) wilayah yakni: Kecamatan Kupang Tengah, Kecamatan Kupang Timur dan Kecamatan Taebenu. <p>Kegiatan dilaksanakan dengan pemasangan spanduk dan penempelan stiker yang bertuliskan</p>	Kabupaten Kupang
--	------------------	-----------------------------	---	------------------

			<p>“Gempur Rokok Ilegal:” serta melakukan penindakan dengan menyita cukai rokok ilegal untuk wilayah Kota Kupang sebanyak 98 bungkus rokok = 1960 batang rokok dan 72 keping pita cukai yang terdiri dari rokok Saga, rokok capucino, rokok java dan rokok Troy. Untuk wilayah Kabupaten Kupang sebanyak 315 bungkus = 6300 batang dan 1.122 keping pita cukai yang terdiri dari rokok Saga dan rokok capucino</p>	
E.	<p>Sub kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi Laporan Keuangan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah dengan rincian kegiatan sebagai berikut :</p>			
	<p>1. Program Pengelolaan Keuangan daerah dengan</p>	<p>List rekapan LRA Kabupaten/Kota</p>	<p>1 (satu) list rekapan LRA</p>	<p>Berlanjut untuk bulan Juli Tahun</p>

	rincian kegiatan Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada 22 Kabupaten/Kota Pengelolaan Keuangan daerah dengan rincian kegiatan Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada 22 Kabupaten/Kota	keadaan sampai dengan 30 Juni 2023 sebanyak 1 (satu) dokumen	Kabupaten/Kota dan telah dikirimkan kepada Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia dan Kanwil Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	2023 yang akan dilaporkan di bulan Agustus Tahun 2023
	2. Menyusun Data Statistik Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021	Draf daftar/list Data Statistik Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021	Draf data Statistik Keuangan Daerah Tahun 2021	Berlanjut untuk bulan-bulan berikutnya
	3. Konsep Statistik Keuangan Daerah Tahun 2022 untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota	Konsep Statistik Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022	Konsep Statistik Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022	Berlanjut untuk bulan-bulan berikutnya
F.	Sub kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Umum dengan rincian kegiatan sebagai berikut :			
	1. Penyusunan laporan kegiatan bidang pembinaan keuangan kabupaten/kota bulan Juni 2023	Laporan kegiatan bidang pembinaan kabupaten/kota bulan Juni 2023	Disampaikan laporan kegiatan bidang pembinaan kabupaten/kota bulan Juni 2023 kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Telah disampaikan pada hari Rabu, 3 Juni 2023 ke Sekretariat Badan Keuangan Daerah provinsi NTT
	2. Pelaksanaan Rapat koordinasi bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan	Rapat koordinasi bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota dengan agenda	Terinformasinya, terkoordinasinya, tersusunnya laporan dan dipenuhinya data	Rapat dilaksanakan pada hari Senin, 19 Juni 2023

	<p>agenda rapat tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan laporan sosialisasi ketentuan dibidang Cukai Rokok Ilegal • Penyusunan laporan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai illegal • Permintaan soft copy RanPerda dan Ranperbup serta soft copy LKPD dan LHP sekaligus jadwal sidang DPRD Kab/Kota • Koordinasi kab/kota terkait pendanaan pemilukada serta persiapan NPHD 	<p>rapat tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan laporan sosialisasi ketentuan dibidang Cukai Rokok Ilegal b. Penyusunan laporan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai illegal c. Permintaan soft copy RanPerda dan Ranperbup serta soft copy LKPD dan LHP sekaligus jadwal sidang DPRD Kab/Kota d. Koordinasi kab/kota terkait pendanaan pemilukada serta persiapan NPHD 	<p>dari Kabupaten/Kota</p>	
--	--	---	----------------------------	--

Sumber : Laporan Bidang PKKK Juni 2023

c. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Perbendaharaan dengan Pagu sebesar Rp. 1.902.327.688,- Realisasi Rp. 922.788.770,- (48,51%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.12

**Hasil Pelaksanaan Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah
per 30 Juni 2023**

PROGRAM	KEGIATAN	BENTUK/WUJUD	REALISASI	KET
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan	Pengelolaan Kas Daerah	Menerima, memverifikasi dan memproses SPP/SPM dari Perangkat Daerah (PD) Lingkup Pemprov. NTT dan selanjutnya diproses menjadi SP2D.	Belanja Daerah 476	Doc
			Terdiri Dari SP2D :	
			LS Gaji 63	Doc
			LS Terusan Gaji 7	Doc
			LS Kekurangan Gaji 5	Doc
			LS Susulan Gaji 1	Doc
			LS Gaji PPPK 47	Doc
			LS TPP PPPK 3	Doc
			LS Terusan Gaji 13 1	Doc
			LS Gaji 13 60	Doc
			LS Susulan Gaji 13 2	Doc
			LS Barang dan Jasa 58	Doc
			GU 38	Doc
			LS Gaji Honorer 41	Doc
			LS Honorarium 6	Doc
			LS Gaji 13 PPPK 47	Doc
			LS Modal 22	Doc
			LS DPRD 3	Doc
			LS TPP 42	Doc
			LS Susulan TPP 2	Doc
			LS TPP Purna Bhakti 26	Doc
			LS Gaji 2	Doc

			Terusan THR	
		Membuat SKPP (Pensiun BUP, Pensiun Dini, Janda Duda dan Pindah)	SKPP Pindah : 1 SK SKPP BUP : 21 SK : 6 SK SKPP Meninggal : 1 SK :- SK SKPP Diberhentikan SKPP Pensiun Dini	
		Membuat Laporan Bulanan tentang : - Data Belanja Gaji Pegawai dan TPP Bulan Juni Tahun Anggaran 2023 untuk Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) - Data Belanja Gaji PPPK dan TPP Bulan Juni Tahun Anggaran 2023 untuk Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Ke Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)	Surat Pengantar : 1. 067/1418 /BKUD3.1/2023 Tgl. 06 Juli 2023	
		Menginput Perubahan data Gaji PNSD dan Guru SMA/SMK se Prov. NTT	Perubahan Gaji, Berkala/Naik Pangkat : PNS : 279 org Guru : 262	

		Melakukan verifikasi terhadap SP2D yang akan dilakukan pencairan	476 SP2D	
		Melakukan pengiriman Daftar Transaksi Harian (DTH) dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Bulan Mei 2023 ke KPP Pratama Kupang	Surat Pengantar Nomor : 067/1356/BKUD3.3/2023 Tanggal 26 Juni 2023	
		Melakukan Konfirmasi Dana Pusat melalui Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) Bulan Mei 2023 ke : 1. Kepala KPPN Cabang Kupang 2. Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah Jakarta	Surat Pengantar Nomor : 1. 067/1234/BKUD3.3/2023 2. 067/1233/BKUD3.3/2023 Tgl . 09 Juni 2023	
		Melakukan Pengiriman Daftar Rekapitulasi, Bukti Billing, Iuran Wajib Pegawai dan Bukti Billing Iuran Asuransi Kesehatan Bulan Mei	Surat Pengantar Nomor : 1. 067/1189/BKUD3.3/2023 2. 067/1190/BKUD3.3/2023 3. 067/1191/BKUD3.3/2023 Tanggal, 05 Juni 2023	
		Melakukan Pengiriman Daftar Transaksi Harian (RTH) Bulan Mei 2023 Ke KPPN Kupang	Surat Pengantar Nomor: 067/1374/BKUD3.3/2023 Tanggal, 27 Juni 2023	
		Surat Keluar ditujukan kepada :		

		<p>1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Perihal Pembayaran TPP</p> <p>2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Perihal Surat Keterangan Ketersediaan Dana</p>	<p>Nomor : 067/1301/BKUD3.2/2023 Tanggal, 19 Juni 2023</p> <p>Nomor : 067/1351/BKUD3.2/2023 Tanggal, 26 Juni 2023</p>	
	Pembinaan Bendahara	Membuat Surat Keputusan Gubernur tentang : Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 900/126/BKUD3.3/2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur	<p>Nomor : 900/1267/BKUD3/2023 Tanggal, 13 Juni 2023</p>	
		Melakukan pengiriman bukti pembayaran beras ke Bulog Bulan Juni 2023	33 Setoran	
		Rekapitulasi LHP BPK RI dan Inspektorat Daerah Prov. NTT Keadaan Juni 2023	<p>LHP BPK RI (18 kasus) Nominal Rp. 149.022.549 LHP Inspektorat Daerah Prov. NTT (752 kasus) Nominal Rp. 7.993.699.327 Rincian terlampir</p>	
	Pengagendaan Surat	Surat Masuk Surat Keluar	<p>Total = 66 Surat Total = 11 Surat</p>	

d. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Akuntansi dan Pelaporan dengan Pagu sebesar Rp. 2.066.628.302,- Realisasi Rp. 1.391.066.906,- (67.31%) Hasil (output) pelaksanaan kegiatan:

- a. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 25.000.000 dan sampai Dengan tanggal 30 Juni 2023 belum di realisasi.

Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

⇒ Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Bulanan Juni 2023

⇒ Tersusunnya Laporan Realisasi (LRA) Bulan 2023

- b. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 319.457.002,- dan sampai dengan 30 Juni 2023 realisasi Sebesar Rp. 180.833.000,- Atau (56,60%)

Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

⇒ Tersusunnya Laporan Keuangan (Unaudited) SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT TA 2023;

⇒ Berkoordinasi dengan Tim pemeriksa BPK RI perwakilan Provinsi NTT terkait Pemeriksaan pendahuluan terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023;

- c. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT, dianggarkan sebesar Rp. 2.061.672.100,- dan realisasi sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp. 1.857.535.711,- atau (90.09%).

Hasil (ouput) pelaksanaan kegiatan :

⇒ Tersusunnya Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA 2023

⇒ Tersusunnya Ranperda tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTT TA
2023

Tabel 3.13

**Realisasi Fisik Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Bidang Akuntansi dan Pelaporan
per 30 Juni 2023**

Program	Rincina Kegiatan	Target (dokumen/ kegiatan)	Realisasi (dokumen/ kegiatan)	Ket
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Akuntansi & Pelaporan Keuangan Daerah	1. Sub kegiatan Koordinasi pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	3 Dokumen	3 Dokumen	
	2. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	3 Dokumen	3 Dokumen	
	3. Koordinasi dan penyusunan Ranperda dan Ranpergub tentang Pert. Pelaksanaan APBD Prov.NTT	2 dokumen	2 dokumen	

e. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan ini ditangani oleh Bidang Anggaran dan Bidang Akuntansi Pelaporan, terdiri dari Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah dan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan Pagusebesar Rp. 946.055.924.054 ,-Realisasi Rp.212.954.976.824,- (22.51%). Hasil (output) pelaksanaan kegiatan :

⇒ Terbayarnya Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Daerah

⇒ Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak.

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini merupakan salah satu program yang berada dalam satu urusan yakni Urusan Keuangan. Salah satu kegiatan dalam Program ini yang ditangani oleh Badan Keuangan Daerah adalah Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mana terdapat 1 Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga. Pagu sebesar Rp. 1.393.409.172,- Realisasi Rp. 1.142.461.075,- (81.99%). Penyusunan Standar Harga masih berlangsung hingga sekarang (kondisi 30 Juni 2023)

BAB IV

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

4.1 Permasalahan dan Solusi

Dalam proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang pada Badan Keuangan Daerah terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

a. Permasalahan

- 1) Sebagian besar (bidang/sub bidang/sekretariat/sub bagian) belum menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tepat waktu.
- 2) Ketersediaan ASN yang masih terbatas

b. Solusi

- 1) Masing-masing bidang/sub bidang/sub bagian segera menyampaikan Laporan Bulanan paling lambat satu minggu setelah diminta.
- 2) Mengusulkan penambahan ASN untuk ditempatkan pada Sekretariat .

2. Bidang Anggaran

a. Permasalahan

1. Terdapat Kendala Dalam Persiapan Penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan Tahap I Sesuai Nomor 212/PMK.07/2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang di Tentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.

b. Solusi

1. Secara Rutin Melakukan Koordinasi dan Rapat Tim Dengan Perangkat Daerah yang Mendapat Alokasi Dana Alokasi Umum Specific Grant Yakni Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Bidang Pekerjaan Umum Agar Dapat Menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan Tahap I Sesuai Jadwal yang Telah Ditentukan.

3. Bidang Perbendaharaan

a. Permasalahan

- 1) Penggunaan Aplikasi Cash Management System (CMS) pada Organisasi Perangkat Daerah belum maksimal bahkan ada OPD yang belum menggunakan CMS
- 2) Hasil rekonsiliasi data KP4 Guru-guru di kabupaten/Kota terdapat kelebihan Tunjangan Keluarga baik kelebihan tunjangan suami/istri, anak.
- 3) Per April 2023 LHP BPK RI Tahun Anggaran 2022 terdapat 24 kasus, LHP Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022 Terdapat 758 kasus.

b. Solusi

- 1) Dibentuk Tim Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Aplikasi Cash Management System (CMS) Dilingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan PT. Bank NTT.
- 2) Bidang Perbendaharaan sudah turun ke Kabupaten/kota untuk melakukan klarifikasi KP4 dengan guru-guru yang terdapat temuan kelebihan pembayaran tunjangan keluarga untuk bisa setor kembali ke rekening kas daerah dan membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) serta Surat Kuasa Untuk Melakukan Pemotongan Gaji dan atau Penghasilan lainnya jika guru yang terdapat temuan belum bisa setor sekaligus.
- 3) Bidang Perbendaharaan sebagai narasumber dalam monitoring evaluasi DAK terkait mekanisme penyaluran dan pelaksanaan DAK Fisik Tahun Anggaran 2023 agar terjadi sinkronisasi antara OPD, BAPEDA, Inspektorat dan Biro Pengadaan Barang Dan Jasa.

4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

a. Permasalahan

- 1) Berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang akuntansi dan pelaporan, maka kendala yang terjadi adalah penyerapan anggaran per 30 Juni 2023 untuk bidang akuntansi dan pelaporan masih tergolong rendah hal ini disebabkan karena disesuaikan dengan schedule dan waktu pelaksanaan program/kegiatan.

5. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota

a. Permasalahan

1. Belum tepat waktu kabupaten/kota menyampaikan laporan realisasi anggaran (LRA) setiap bulan.
2. Dibeberapa kabupaten perbandingan antara Ranperda Pertanggungjawaban dengan Rancangan kepala Daerah tentang Penjabaran pada capaian realisasi program, kegiatan, jenis, objek dan rincian obyek belanja pada beberapa SKPD masih terdapat:
 - a. presentase realisasinya lebih besar dari yang dialokasikan/dianggarkan, (baik pendapatan maupun belanja)
 - b. presentase realisasinya jauh dibawah yang dianggarkan
 - c. dialokasikan /dianggarkan belanja tapi tidak terealisasi
 - d. tidak dianggarkan namun terdapat realisasi
3. Ratio tingkat kemandirian di beberapa kabupaten belum menunjukkan kenaikan yang signifikan antara lain :
 - a. Kabupaten manggarai tingkat kemandirian naik sebesar (0.08%)
 - b. Kabupaten Alor tingkat kemandirian menurun sebesar (1.61%)
 - c. Kabupaten sumba tengah tingkat kemandirian menurun sebesar (0.59%)
 - d. Kabupaten TTU tingkat kemandirian naik (1.54%)
4. Beberapa persoalan terkaait dana desa di Kabupaten yakni :
 - a. Masih terdapat kabupaten yang belum melengkapi data realisasi dana desa
 - b. Masih terdapat sisa dana yang tidak digunakan oleh desa

5. Beberapa persoalan terkait pengelolaan dana kapitasi FKTP di Kabupaten yakni:
 - a. Di beberapa puskesmas di kabupaten yang masih terdapat sisa dana cukup besar baik kapitasi maupun non kapitasi yang tidak dimanfaatkan.
 - b. Masih terdapat perbedaan jumlah anggaran yang diterima/yang dimanfaatkan dengan pendapatan dana kapitasi JKN sesuai CALK pada LHP BPK atas LKPD Kab sehingga terdapat selisih jika dibandingkan dengan jumlah anggaran yang di terima dan yang telah dimanfaatkan
6. Beberapa persoalan terkait dana bos di kabupaten yaitu :
 - a. Berdasarkan laporan realisasi dana BOS masih terdapat selisih
 - b. Masih terdapat kekeliruhan dalam perhitungan dana bos
7. Pada pembahasan RKPD kab/kota beberapa persoalan yang ditemui yakni:
 - a. Kebijakan perencanaan penganggaran pada kab/kota belum dapat menterjemahkan kebutuhan dan prioritas daerah serta kebermanfaatannya untuk masyarakat namun lebih pada perencanaan penganggaran yang masih pada tugas dan fungsi dari perangkat daerah tersebut.
 - b. Masih terdapat alokasi anggaran berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya
 - c. Penetapan target PAD khususnya pajak dan retribusi terlalu tinggi
 - d. *Masih terdapat belanja daerah yang overspending, misspending, underspending*

b. Solusi

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar menyampaikan LRA tepat waktu setiap bulan sesuai jadwal yang ditentukan melalui grup whatsapp maupun dihubungi secara langsung.

2. Pemerintah Provinsi NTT akan tetap melaksanakan fungsi koordinasi dan konsultatif yang intensif dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota agar dapat segera menyusun dan menetapkan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah dan 4 (empat) peraturan kepala Daerah tentang system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, kebijakan akuntansi daerah, sistem akuntansi pemerintah daerah dan analisis standar belanja. Selain itu dapat menyampaikan Data Pendanaan Pemilukada Serentak Tahun Anggaran 2024 yang diminta oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota didorong untuk menyiapkan Penganggaran Pilkada sesuai hasil kesepakatan Rapat Koordinasi Tanggal 14 April 2023 di Kupang.
4. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengarahkan Pemerintah Kabupaten/Kota agar hal-hal teknis yang menjadi koreksi dalam Hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban TA 2022 menjadi bahan perbaikan untuk tahun anggaran berikutnya agar tidak mengulangi ataupun dapat meminimalisir kesalahan yang sama sehingga ada perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah di tahun mendatang.

BAB V PENUTUP

Demikian Laporan Semester I ini disusun dan disampaikan, sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja pada lingkup Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023. Hal – hal lain yang belum dimuat dalam panduan ini akan dibahas saat evaluasi berlangsung.

Kupang, Juli 2023

9
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Drs. ZAKARIAS MORUK, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631209 198603 1 016